

DEMOKRATISASI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Fathorrahman
 STTT Aqidah Usumuni Sumenep
 e-mail: fathorrahmanalmanar@gmail.com

Abstract: Educational democracy is a democracy that provides equal educational opportunities to all people, regardless of race (ethnicity), beliefs, color and social status. The principles of democracy can be implemented in the Islamic education system because basically Islam gives freedom to individuals (students) to develop the values of nature that are in themselves in aligning with the times. The democratization of education in Islamic education is reflected in aspects: First: Monotheism: a paradigm of liberation. Second, *Shura*: a vehicle for openness. Third, *Al-Adl*: a classless society. Fourth, *Amar Makruf Nahi Mungkar*: monotheistic, doing good deeds, being cautious and *ulul albab*. Fifth, *Tawassut* Principle: principle of moderation. Sixth, the obligations and human rights in the development of science.

Keywords: democratization, education, Islamic education

PENDAHULUAN

Semarak, ataupun gegap gempita pendidikan Islam masih perlu dipertanyakan. Banyaknya lembaga pendidikan dan banyaknya peserta didik masih belum menunjukkan “taji” yang tajam dalam mengasah pendidikan Islam. Dalam dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah lebih bertendensi pada sistem kelas dan diorientasikan pada korporasi pendidikan.¹

Dikota besar, disparitas pendidikan masih menganga lebar. Antara pendidikan elit dan non elit, kaya-miskin, maju-stagnan benar-benar dipertontonkan bagai sirkus. Dikotomi pendidikan merupakan persoalan bangsa yang tak pernah habis. Demikian pula dipelosok, pendidikan masih belum merata. Hambatan ekonomi masih menjadi “hantu” yang mengerikan. Alih-alih untuk mendapatkan fasilitas seperti di kota, untuk bersekolah ditingkat kabupaten hanyalah impian belaka. Mimpi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hanyalah angan belaka.

Maka, Tan Malaka menulis dalam “*Madilog*” tentang kesempatan pendidikan yang merata dan esensial sebagai berikut: “Kalau pendidikan disekolah disandarkan

¹ Korporasi pendidikan ialah prosesi pendidikan yang berusaha dimanfaatkan oleh para elit pengampu kebijakan dengan cara mencari keuntungan demi kebutuhan hidupnya. Korporasi pendidikan muncul akibat dari sistem kapitalisme di era modern ini.

secara langsung pada masyarakat dan alam raya, maka pengetahuan yang diperlukan pemuda dan pemudi kita, pengetahuan yang didasarkan fakta yang sah dan mulia, dapat tertanam dengan kukuh. Kalau pengetahuan itu dimegahkan dengan bahasa dan sastra, oleh olahraga yang berdasarkan semangat dan menimbulkan iman yang tebal tabah; dan kalau masyarakat kita tidak lagi didasarkan pada penghisapan dan penindasan, kesempatan merata pada tiap orang, maka pendidikan tadi akan medapat lantai yang subur dan kukuh”.²

Maka demokratisasi dalam pendidikan Islam menjadi (salah satu) solusi untuk menjawab model pendidikan di Indonesia. Anak-anak bangsa butuh pendidikan yang demokratis, yang nyaman untuk belajar dan merata disegala lapisan masyarakat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dizaman sekarang ini.

Barangkali yang terjadi hanyalah pendidikan yang bersifat formal, masih belum menyentuh ranah yang esensi dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan hanya sebagai sapi perah pagi penguasa, komoditas politik, dan *tetek bengek* lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat menjadi sebuah wahana pendidikan kritis bagi rakyat; membebaskan lapisan terbawah masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.³

PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*demos*” dan “*cratos*”, *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan yang berakar pada rakyat. Dengan demikian dalam terma politik dikatakan bahwa kedaulatan tertinggi terletak ditangan rakyat. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai: “gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”.⁴

² Tan Malaka, *Madilog: Materialisme Dialektika Logika* (Jakarta: Pusat Data Indikator, 1999) 433.

³ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1998), 86

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 195

Sementara moment terpenting dari demokrasi adalah kebebasan berbicara dan berkehendak (*freedom of speak and press*). Artinya dalam tubuh demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem yang menyangkut gabungan kebutuhan naluriah dan pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas dan melibatkan semakin banyak unsur yang ada di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, *pluralisme* dan *relativisme* kebenaran akhirnya muncul untuk menggantikan *absolutisme* dan *superioritas* keserbatunggalan yang kini tampak lebih menjadi *aus* dan usang oleh petasan *transformative* sosial budaya dan perubahan masyarakat modern.⁵

Namun dalam praktek demokrasi, nilai-nilai individu tersebut di atas sering disalah gunakan, seperti yang dikemukakan Hasan Langgulung bahwa kebiasaan dari segala belenggu kebendaan kerohanian yang tidak sah yang kadang-kadang dipaksakan kepada manusia, tanpa alasan yang benar pada kehidupan sehari-hari yang menyebabkan ia tidak sanggup menikmati hak-haknya yang wajar. Sehingga yang terjadi bukan demokrasi yang di idam-idamkan, tetapi anti demokrasi yang menjurus pada tindakan anarkhis yang menindas hak-hak kebebasan dan martabat orang lain. Oleh karena itu, prinsip demokrasi perlu dilihat secara keseluruhan, bukan hanya secara parsial prinsip-prinsip demokrasi tersebut adalah: 1) kebebasan, 2) penghormatan terhadap manusia, 3) persamaan, 4) dan pembagian kekuasaan.

Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai potensi individu yang berbeda dan individu yang mau hidup bersama. Dengan demikian, segala jenis *homogenisasi* masyarakat yaitu menyamaratakan anggota masyarakat menuju *uniformitas* adalah bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip hidup demokrasi termasuk didalamnya pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan inti dari kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan.⁶

Kuatnya tuntutan demokrasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu system yang bisa menjamin keteraturan politik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat

⁵ Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Iktilaf dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2001),

⁶ H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Reineka Cipa, 2002), 11

menuju struktur social, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam arti , manusiawi, *egaliter* dan berkeadilan.⁷

Meskipun demokrasi sesungguhnya merupakan istilah politik, namun terjemahan dan kongkritnya tidak hanya ada didalam kehidupan politik. Seluruh aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan masyarakat luas dan berada dalam system kenegaraan membutuhkan demokrasi, karena manusia sebagai hamba Allah butuh dimanusiakan dan dimanusiawikan, sedangkan demokrasi adalah ungkapan lain dari penghormatan hak-hak azasi manusia, suatu sikap hidup insani yang mencerminkan dan dimiliki dan ditegakkannya peradaban dan kebudayaan.⁸

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pendidikan

Apabila dihubungkan dengan pendidikan maka pengertiannya sebagai berikut: pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak (peserta didik) mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak dan perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan.

Dengan demikian, demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras (suku), kepercayaan, warna dan status sosial. Definisi ini memberi pengertian bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Masing-masing mempunyai hak otonom untuk mengekspresikan dan mengaktualkan potensi yang dimilikinya melalui pendidikan.

Demokratisasi pendidikan juga dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat dan orang tua berbentuk dalam hubungan

⁷ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1-2.

⁸ Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2001), 89.

kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan anak. Hal ini menuntut partisipasi lebih besar dari warga lembaga pendidikan dalam setiap kebijakan dan sepanjang proses pembuatan keputusan berlangsung dan semua keputusan dibuat secara kolektif dan sinergis bersama *stakeholders*.

Pengambilan keputusan partisipatif semacam ini merupakan suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Dalam artian bahwa warga sekolah (siswa, karyawan, orang tua siswa dan tokoh masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung di dalam proses pengambilan keputusan maka yang bersangkutan akan ada “rasa memiliki” terhadap keputusan tersebut sehingga ia juga akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah.

Untuk memahami lebih jauh mengenai prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan, perlulah kita mengetahui beberapa hal berikut:

1. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan
2. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan
3. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.

Dari kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat dan jenis masyarakat di mana mereka berada sebab dalam realitasnya, pengembangan demokrasi pendidikan tersebut akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Apabila pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi tadi, maka berarti akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya.
2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan

pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merugikan pihak lain.⁹

ANALISIS

A. Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam

Mengacu pada karakteristik demokrasi di atas, maka prinsip-prinsip demokrasi dapat pula diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam karena pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu (anak didik) untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya dalam menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Islam juga memberikan petunjuk kepada para pendidik sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi yang telah dibawanya sejak lahir.¹⁰

Dalam prakteknya ternyata demokrasi telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan istilah musyawarah. Salah satu contoh dapat dikemukakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi masalah strategi perang dan diplomasi dengan musuh, tergambar jelas bagaimana Nabi Muhammad menyelesaikan masalah sosial politik yang sedang dihadapi dan beliau selalu aspiratif dan dapat mentolerir adanya perbedaan pendapat diantara para sahabat, tidak terkecuali berhadapan dengan musuh.

Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan terkadang beliau mengikuti mayoritas, dan ada pula mengambil keputusan dengan pendapat sendiri tanpa mengambil saran sahabat. Dengan kata lain Nabi Muhammad SAW tidak menentukan suatu sistem, cara dan metode musyawarah secara baku, tetapi lebih bersifat *variatif fleksibel*, dan *adaptif*.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. 3:159 yang artinya: “Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu membulatkan tekad maka

⁹ M. Djumberansyah Indar, *Filsafat Pendidikan*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), 118.

¹⁰ Yudi Usman, *Demokratisasi Pendidikan*, (ttp: Nidamia, 2001), 13

bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang bertawakal kepadanya”.¹¹

Ayat di atas ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar bermusyawarah dalam persoalan-persoalan yang dihadapi dengan para sahabatnya atau anggota masyarakat. Hal ini merupakan bukti keluruhan dan kebijakan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Serta kemuliaan budi pekertinya. Dari konsep musyawarah tersebut ada nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi yang menjadi prinsip dasar demokrasi. Nilai-nilai tersebut diantaranya:

1. Prinsip kebebasan
2. Prinsip persamaan
3. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

B. Cerminan Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam

Demokratisasi pendidikan dalam pendidikan Islam tercermin dalam aspek:

1. Tauhid: Sebuah paradigma pembebasan.

Tauhid¹² sebagai salah satu kunci pokok keislaman, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada penghambaan atau penyembahan kecuali Allah SWT., bebas dari belenggu kebendaan dan kerohanian. Dengan kata lain, seseorang telah mengikrarkan diri dengan dua kalimat syahadat berarti telah melepaskan diri dari belenggu dan subordinasi apa pun.

Formulasi tauhid yang paling singkat tetapi tegas adalah kalimah toyyibah: *La ilaha illallah*” yang berarti “tidak ada Tuhan selain Allah. Sebuah kalimat penegas sekaligus pembebas dari anasir-anasir pengkultusan,

¹¹ Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Quran, 1971), 103.

¹² Secara terminologis tauhid berarti pengakuan terhadap keesaan Allah. Secara metafisis dan aksiologis tauhid menduduki posisi tertinggi karena Dia ada dengan sendirinya secara mutlak dan transenden, sedang keberadaan sesuatu yang lain tergantung olehNya. Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 84. Menurut para Ulama’, konsep Tauhid dibedakan menjadi dua macam, *pertama*, Tauhid Rububiyah yaitu konsep Tauhid yang menekankan pada wujud Tuhan atau eksistensi Tuhan. Kaitannya dengan pendidikan, Tauhid rububiyah ini mengajarkan manusia untuk berpikir rasional, empiris dan matematis. *Kedua*, *Tauhid Ulubiyah*, yaitu tauhid yang menjelaskan perlunya atau keharusan beribadah hanya kepada Allah semata. *Tauhid Ulubiyah* mengajarkan kepada manusia sikap bebas dan kritis. Maka timbullah keberanian untuk mengatakan yang benar (haq) dan menyingkirkan kedhaliman (bathil) dalam rangka mengkritisi setiap keadaan yang berbentuk ritus, kultus, rasialisme dan otoritarisme. Lihat Arifin dan Barizi, *Paradigma Pendidikan Islam*, 102.

penyembahan, penindasan dan perudakan. Maka dari itu Tauhid dapat dijadikan landasan bagi terwujudnya asas demokrasi dalam pendidikan.¹³

Oleh karena itu, Tauhid merupakan suatu konsep yang berisikan nilai-nilai fundamental yang tidak saja bebas dan merdeka, melainkan sadar pada eksistensi sebagai hamba, sama dihadapan sang kholiq, yang membedakan adalah ketaqwaannya.

2. *Syura*: Sebuah wahana keterbukaan

Kaitannya dengan demokrasi, *Syura* merupakan kata kunci penting dalam al-Qur'an. Secara simpel *Syura* diartikan dengan pengambilan keputusan secara bersama. Ini dilandasi semata-mata untuk menjaga semangat kolektivitas disatu sisi dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh individu di sisi lain. Dengan demikian, semangat syura berlawanan dengan sikap individualisme dan depotisme yang sering terjadi ditengah kehidupan.¹⁴

Musyawahar dilakukan dengan maksud mencari kebenaran dan bukan mencari kekuatan berdasar wibawa. Kalau sesuatu diputuskan berdasarkan musyawarah maka semua harus mengikuti aturan yang sudah dimusyawarahkan.

Dalam al-Qur'an kita dianjurkan bermusyawahar: "Ajaklah (olehmu Muhammad) mereka bermusyawahar. Kalau sudah engkau mantap, maka bertawakkallah pada Allah Swt. (QS. Ali Imran: 159). *Syura* merupakan bagian pokok dari demokrasi membawa nilai lain yaitu keterbukaan. Dalam pemikiran pendidikan yang demokratis, keterbukaan sangat mutlak diperlukan. Disamping mengisyaratkan nilai ketebukaan, dalam musyawarah juga membersitkan sebuah nilai tanggung jawab masing-masing anggota.

3. *Al-Adlu*: masyarakat tanpa kelas

Keadilan adalah kosa kata Bahasa Indonesia yang berasal dari al-Qur'an. Makna keadilan itu sendiri bersifat *multidimensional*. Keadilan berintikan kebenaran (*al-haq*). Keadilan berarti pula tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak dan tidak merugikan orang lain dan diri

¹³ Ibid, 85.

¹⁴ Ahmad Amir Aziz, "Demokratisasi Pendidikan dalam Pandangan Islam". *Jurnal Akademika*, 1997.

sendiri.¹⁵ Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan nampak dalam berbagai bentuknya. Keadilan berarti menghukum orang sesuai kesalahannya atau memberi ganjaran sesuai perbuatan baiknya.¹⁶

4. Amar Makruf Nahi Mungkar

Dalam al-Qur'an, Amar Makruf Nahi Mungkar dikaitkan dengan kualitas manusia yaitu Surah Ali Imran ayat 110: "*Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, mengajak pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah*"

Sayyid Qutub dalam kitab Tafsirnya *Fi Zbilalill Qur'an* menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan pada umat Islam agar mereka mengetahui posisi dirinya sebagai umat terbaik, mereka dilahirkan agar maju ke garis terdepan dalam semua bidang kehidupan. Mereka harus memiliki kekuatan atau kualitas fisik dan mental untuk melakukan perbaikan dan mencegah kemungkaran dengan landasan tauhid.¹⁷ Posisi sebagai umat terbaik baru merupakan kondisi bersyarat (*conditional state*), artinya posisi itu baru terwujud dan terlaksana kalau ditunjang oleh kualitas diri yang memadai (ber-tauhid, beramal shalih, bertakwa dan ulul albab), sehingga memungkinkan mereka melaksanakan rekonstruksi social, dari yang tidak baik menjadi baik.

5. *Tawassuth*: Prinsip Moderasi

Prinsip *tawassuth* (moderasi) adalah suatu prinsip yang menggambarkan karakteristik agama Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 143 yang artinya: "*Dan demikianlah, Kami telah menjadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia dan supaya Rasulullah Saw. Menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian*"

Dari pengertian ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sikap perbuatan umat Islam harus senantiasa memegang prinsip pertengahan (moderat). *Al-Tawassuth* bukanlah serba *kompromistis* dengan mencampur

¹⁵ Dawam Rahardjo, "Adl", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. 5, (1994), 47.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zbilalill Qur'an*, Terj. Ahmad Yasin dkk, (Jakarta Gema Insani Press, 1992), Jilid III, 191.

adukkan semua unsur. Juga bukan dengan mengucilkan diri dengan menolak unsur-unsur apapun. Penerapan prinsip dan karakter *tawassut* ini tidak hanya pada bidang akidah saja, namun dapat diterapkan baik dalam bidang *syari'ah*, kehidupan bernegara serta dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya.¹⁸

Implementasi nyata sikap *tawassut* dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada lembaga Islam tertua yakni pesantren. Pesantren adalah lembaga pengembangan keilmuan dan pengajaran Islam di Nusantara yang selalu dengan luwes mampu berdiri pada sikap pertengahan (*tawassuth*). Lembaga pendidikan yang khas Indonesia ini mampu mengadopsi sistem pendidikan Barat (sekolah formal) tanpa menghilangkan jati dirinya yang mempunyai ciri khazanah keilmuan klasik (kitab kuning).

6. Kewajiban dan Hak Manusia dalam Pengembangan Ilmu

Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dan hak asasi manusia dalam Islam. Karena sikap Islam dalam berhadapan dengan pendidikan dan sains modern senantiasa simpatik. Setiap manusia mempunyai hak mutlak untuk memperoleh pengetahuan sebanyak yang ia kehendaki. Hadist Nabi: *"menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan"*.

Hadist ini mencerminkan bahwa dalam Islam terdapat demokratisasi pendidikan, dimana Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban menuntut ilmu. Demokratisasi menjadi sebuah keharusan untuk dipraktekkan dalam pendidikan Islam. Sebagai instrumen perekat dan pemersatu bangsa dalam tataran praktis pendidikan harus mengakomodasikan secara luas prinsip-prinsip demokratis dan egaliter. Untuk kepentingan itu, Nabi SAW. Mengedepankan dirinya sebagai *Uswah hasanah* atau teladan kebaikan.

KESIMPULAN

Disparitas pendidikan masih menganga lebar. Antara pendidikan elit dan non elit, kaya-miskin, maju-stagnan benar-benar dipertontonkan bagai sirkus. Dikotomi

¹⁸ Ahmad Siddiq, *"Khitthab Nabdhyyah"*, (Surabaya: Khalista, 2005), 62.

pendidikan merupakan persoalan bangsa yang tak pernah habis. Demikian pula dipelosok, pendidikan masih belum merata. Hambatan ekonomi masih menjadi “hantu” yang mengerikan. Maka demokratisasi dalam pendidikan Islam menjadi (salah satu) solusi untuk menjawab model pendidikan di Indonesia. Anak-anak bangsa butuh pendidikan yang demokratis, yang nyaman untuk belajar dan merata disegala lapisan masyarakat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dizaman sekarang ini. Demokratisasi pendidikan dalam pendidikan Islam tercermin dalam aspek: *Pertama*: Tauhid: sebuah paradigma pembebasan. Bebas dari belenggu kebendaan dan kerohanian, pembebas dari anasir-anasir pengkultusan, penyembahan, penindasan dan perbudakan. Maka dari itu Tauhid dapat dijadikan landasan bagi terwujudnya asas demokrasi dalam pendidikan. *Kedua*, *Syura*: sebuah wahana keterbukaan. *Syura* diartikan dengan pengambilan keputusan secara bersama, semangat kolektivitas. *Ketiga*, *Al-Adlur*: masyarakat tanpa kelas. Keadilan tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak dan tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Prinsip Keadilan menempati azas yang urgen dalam demokratisasi pendidikan Islam. *Keempat*, *Amar Makruf Nahi Mungkar*. *Amar Makruf Nahi Mungkar* dikaitkan dengan kualitas manusia. Posisi itu baru terwujud dan terlaksana kalau ditunjang oleh kualitas diri yang memadai (ber-tauhid, beramal shalih, bertakwa dan ulul albab). *Kelima*, *Tawassut*: prinsip moderasi. Prinsip ini dapat diterapkan baik dalam bidang syari’ah, kehidupan bernegara serta dalam bidang pendidikan. *Keenam*, *Kewajiban dan hak manusia dalam pengembangan ilmu*. Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban menuntut ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Quran, 1971.
- Achmadi. *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arifin, Syamsul dan Ahmad Barizi. *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Iktilaf dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2001.
- Aziz, Ahmad Amir. *Demokratisai Pendidikan dalam Pandangan Islam*. Akademika, 1997.

- Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Indar, M. Djumberansyah. *Filsafat Pendidikan*. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi (Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2002.
- . *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Reineka Cipta, 2002
- Yudi, Usman. *Demokratisasi Pendidikan*. Nidamia, 2001